

ABSTRACT

Fadhli, Muhammad. 2015. *Penegakan hukum di Wilayah Laut yang Menjadi Yurisdiksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Semarang : Islamic University Of Sultan Agung Semarang. Under the Supervision of Munsharif Abdul Chalim.

Keyword : *Yurisdiksi dan Hukum Laut Internasional*.

Natural resource issues which is very abundant in Indonesia invite other nations to take the advantage by doing the unlawful activities and threaten the sovereignty of the Republican state of Indonesia. Problem Statement of this research is how the way the Republican state of Indonesia keep the sovereignty in the sea area jurisdiction. Then, the purposes of this research are to know the way and the problem of the Republican state of Indonesia keep the sovereignty in the sea area jurisdiction.

In this research used normative approach. Characteristic of this research is descriptive. In this research use sources of law materials as follows UUD 1945, UU NO 6 Thn 1996, UU NO 32 Thn 2014, Declaration of Juanda 1957, Convention of Jenewa 1958 and Convention of PBB 1982. Books and articles that have relation with a law.

Based on the research, It can be concluded that firstly, Indonesia apply Deterrence, Preventive Diplomacy, Cooperative security and role of TNI such as marine security patrols, border security operation, survey of Hydrology and Oceanography, Nusantara Welfare Expedition , TNI AL Bhakti Operation, Mobile Market, Smart Ship and Delimitation of Maritime Boundaries. Secondly, in performing the law enforcement in the sea area jurisdiction, they got some obstacles as follows, an Ego Sectoral among Agencies, Budget, Facilities and Infrastructure, Sea Boundaries, Setting Aspect, a Law Enforcement Issue, the Issue of Authority, Coordination Problem, Related to Aspects of Law Enforcement Issues, the Issue of Authority Development Gap, Law Political and Security.

ABSTRAK

Fadhli, Muhammad. 2015. *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut yang Menjadi Yurisdiksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Hukum Laut Internasional*. Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Pembimbing. Munsharif Abdul Chalim.

Kata Kunci : Yurisdiksi dan Hukum Laut Internasional

Persoalan sumber daya alam di Indonesia yang melimpah mengundang bangsa lain untuk mengambil keuntungan tersebut dengan cara melakukan kegiatan yang melanggar hukum dan dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana cara Negara Republik Indonesia menjaga kedaulatan di wilayah laut yurisdiksinya dan apa saja kendala Negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah laut yurisdiksinya. Lalu, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui cara Negara Republik Indonesia menjaga kedaulatan di wilayah laut yurisdiksinya dan untuk mengetahui apa saja kendala negara Republik Indonesia dalam menjaga kedaulatan di wilayah laut.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUD 1945, UU No. 6 thn 1996, UU No. 32 thn 2014, Deklarasi Juanda 1957, Konvensi Jenewa 1958, dan Konvensi PBB 1982. Serta buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penulisan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pertama Indonesia menerapkan konsep Deterrence, Preventive Diplomacy, Cooperative Security, serta peran TNI AL berupa patroli keamanan laut, operasi pengamanan perbatasan, Survei Hidrologi dan Oseanografi, Ekspedisi Kesra Nusantara (EKN), Operasi Bakti TNI AL, mobile market, Kapal Pintar, serta yang terakhir Delimitasi Batas Maritime. Kedua, dalam menjalankan penegakan hukum di wilayah laut yurisdiksinya menghadapi beberapa kendala berupa, Ego Sektoral antar Instansi, Anggaran, Sarana dan Prasarana, Batas Wilayah Laut, Aspek Pengaturan, Masalah Penegakan Hukum, Masalah Kewenangan, Masalah Koordinasi, Masalah Aspek Penegakan Hukum Terkait, Masalah Pengawasan, Kesenjangan Pembangunan, Politik Hukum dan Keamanan.